



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA
TRIWULAN III 2020



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2020



PUNG NUGROHO SAKSONO
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Triwulan III 2020 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sampai dengan Triwulan III 2020.

LKj berfungsi sebagai alat penilaian kinerja secara kuantitatif, alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Melalui implementasi BSC, pencapaian Sasaran Strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada Tahun 2020.

Pencapaian IKU Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada triwulan III 2020 telah diupayakan melalui pelaksanaan program Pemantauan dan Operasi Armada dengan 4 (empat) output/kegiatan utama, yaitu : ⁽¹⁾ Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP; ⁽²⁾ Operasional Pusat Pengendalian; ⁽³⁾ Penyediaan Logistik dan Pengawasan Kapal Pengawas; dan ⁽⁴⁾ Operasional Armada dan Perawatan.

Penyusunan LKj Triwulan III 2020 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pengawasan SDKP. Semoga di masa mendatang kinerja Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dalam melaksanakan pengawasan SDKP dapat menjadi lebih baik dan terus ditingkatkan.

Jakarta, 12 Oktober 2020

Direktur Pemantauan dan Operasi
Armada

Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM

Tim Penyusun

Penanggungjawab

Direktur Pemantauan dan Operasi Armada

Koordinator Pelaporan Laporan Kinerja Lingkup Direktorat POA Triwulan III 2020

1. Kasubdit Infrastruktur;
2. Kasubbag Tata Usaha Direktorat POA;
3. Putu Pinandytha Bagus Rinata, S.Kel.

Kontributor Penyusunan LKj Lingkup Direktorat POA Tahun 2020

1. Ikrom Bungsu, S.Pi
2. Agus Dwiyanto, ST, M.Ling
3. Edwin Haryanto, S.tr.Pi
4. Bilmantasya Al Fattha, ST

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang	11
Maksud dan Tujuan	11
Tantangan Dan Isu-Isu Strategis	12
Tugas dan Fungsi	15
Sistematika Penyajian	15

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Arah Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024	17
Arah Kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024	21
Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada	19
Perjanjian Kinerja 2020	20
Pengukuran Capaian Kinerja	23

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan III 2020	25
Evaluasi Dan Analisis Pencapaian Kinerja	27
Sasaran Kegiatan 1	27
Sasaran Kegiatan 2	28
Sasaran Kegiatan 3	34
Sasaran Kegiatan 4	37
Sasaran Kegiatan 5	45
Sasaran Kegiatan 6	47
Sasaran Kegiatan 7	48
Sasaran Kegiatan 8	49
Sasaran Kegiatan 9	52
Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Sumber Daya	53

BAB 4

PENUTUP

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan III 2020	8
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2020	21
Tabel 3. Alokasi Anggaran Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2020	23
Tabel 4. Rincian Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Triwulan III 2020	25
Tabel 5. Target dan realisasi IKU-1 periode triwulan III 2020	27
Tabel 6. Target dan realisasi IKU-2 periode triwulan III 2020	28

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

15

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada (POA) telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III 2020. Laporan Kinerja tersebut merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Direktorat POA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi, sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Peta Strategis Direktorat POA tahun 2020 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) tahun 2020-2024.

Sejalan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi dimaksud, Direktorat POA telah menetapkan 9 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 10 Indikator Kinerja (IK). Target pencapaian IKU/IK periode triwulan III 2020 sebanyak 14 IKU/IK, sebanyak 12 IKU/IK telah memenuhi target dan 2 IK yang belum memenuhi target. Capaian kinerja Direktorat POA untuk triwulan III 2020 mencapai 107.88% meningkat dari triwulan tahun III 2019 sebesar 107.03%.

Berbagai kebijakan, pelaksanaan kegiatan dan anggaran triwulan III 2020 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan SDKP. Permasalahan yang dihadapi dan menyebabkan belum tercapainya tiga target IK yaitu IK: tidak tercapai, "Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Dit. POA" dari target **75%** tidak tercapai, "Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat POA" dari target **87%** tidak tercapai hal ini menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat POA pada periode triwulan IV 2020.

Di bidang anggaran, Direktorat POA sampai dengan triwulan III 2020 telah melaksanakan 12 output kegiatan dalam APBN Direktorat POA, Ditjen PSDKP tahun 2020. Pagu Direktorat POA yang semula sebesar Rp270.134.837.000 (dua ratus tujuh puluh milyar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) berdasarkan penyesuaian anggaran dikarenakan Pandemi Covid-19 anggaran Satker Dit. POA menjadi Rp. 195.110.111.000-, (seratus sembilan puluh lima milyar seratus sepuluh juta seratus sebelas ribu rupiah)

Realisasi anggaran Direktorat POA triwulan III 2020 sebesar Rp 101,804,453,359-, atau sekitar **52,18%** dari Pagu anggaran. Realisasi anggaran tersebut lebih tinggi dari periode triwulan III 2019 (**Rp.82.117.659.996**), kenaikan realisasi anggaran ini turut dipengaruhi oleh beberapa kegiatan yang tetap dilaksanakan ditengah pandemi covid-19

Direktorat POA telah merealisasikan anggaran sampai dengan triwulan III 2020 berdasarkan prinsip *budget follow* program secara efektif dan efisien. Berikut disajikan tabel realisasi dan capaian IKU dan IK Direktorat POA periode triwulan III 2020 menurut tujuan dan Sasaran Kegiatan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Direktorat POA Triwulan III 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)	-	-	-
		2	Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas (%)	70	100	100.00
2	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	3	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas (%)	16	46,09	186.30
		4	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Pesawat patroli (%)	13	49.59	161.90
		5	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (%)	1	1,54	104.00
		6	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (Indeks)	80	114,54	104.16
3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7	Jumlah amada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi (Unit)	-	-	-
4	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	8	Indeks kinerja Operasional Kapal Pengawas (Indeks)	-	-	-
		9	Indeks kinerja Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (Indeks)	-	-	-
		10	Jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas (hari)	81	83	102.47
		11	Jumlah rata-rata hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (hari)	11	11	100.00
		12	Jumlah rata-rata hari operasi Pesawat Patroli (hari)	88	96	109.09
		13	Persentase Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan (%)	100	109	109
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	14	Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA (Dokumen)	-	-	-
		15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	72	-	-

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
		16	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (Nilai)	75	0	0
		17	Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis lingkup Direktorat POA (%)	75	100	133,33
		18	Nilai PMSAKIP lingkup Direktorat POA	-	-	-
		19	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat POA	1	-	-
		20	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter)	80	-	-
		21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	75	89,26	119.01
		22	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	50	69,81	139,62
		23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat POA (Nilai)	87	85,63	98.43
Nilai Capaian Kinerja Direktorat POA						107.88%

BAB 1

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan III 2020

A. LATAR BELAKANG

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bagian integral dari pembangunan sektor kelautan dan perikanan, sekaligus merupakan salah satu program/kegiatan prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pengawasan SDKP bertujuan untuk menjamin dimanfaatkannya SDKP secara tertib dan bertanggungjawab, sehingga kelestarian dan keberlanjutan tetap terpelihara untuk kepentingan ekonomi nasional.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Direktorat POA berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Peran tersebut diimplementasikan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Direktorat POA yang handal, profesional, akuntabel, efektif dan efisien diperlukan adanya manajemen kinerja yang di dalamnya meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengukuran dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. Sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara Negara diwajibkan menetapkan target kinerja serta melakukan pengukuran kinerja.

Sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban kepada publik, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat POA telah menyusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat POA triwulan II 2020 yang menginformasikan capaian kinerja selama periode triwulan I 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat POA triwulan III 2020 yaitu: Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja Direktorat POA kepada seluruh *stakeholder*. Kedua, laporan akuntabilitas merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Direktorat POA sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. TANTANGAN DAN ISU-ISU STRATEGIS 2020

C.1. TANTANGAN PENGAWASAN SDKP

Indonesia memiliki luas total sebesar 7.81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan dan 2.55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Ditambah dengan adanya perbatasan laut dengan 10 negara tetangga antara lain: India, Thailand, Republik Palau, Timor Leste, Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, Papua Nugini, dan Vietnam. Hal ini menjadi tantang tersendiri. Mengingat potensi terjadinya klaim wilayah, masuknya nelayan dari negara lain di wilayah perairan Indonesia.

Berdasarkan hal di atas, tantangan yang dihadapi tentu tidak ringan. Dibutuhkan kesiapan armada pengawasan khususnya Kapal Pengawas Perikanan yang memiliki daya jelajah sampai ZEE, kesiapan personil, penerapan teknologi terkini, dan kolaborasi antar instansi maupun antar negara.

Selain itu, tantangan lainnya adalah, masih ditemukannya pelaku IUU *fishing* yang kembali tertangkap oleh petugas, hal ini mengindikasikan belum maksimalnya efek jera terhadap para pelaku IUU *fishing*. Disamping itu berkembangnya modus operandi pelaku IUU *fishing* serta implementasi dari kebijakan pimpinan terkait pelarangan alat tangkap tertentu.

C.2. ISU-ISU STRATEGIS

PRAKTIK ILLEGAL FISHING TETAP MARAK DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Situasi pandemic Covid-19 yang sedang melanda seluruh dunia nyatanya tidak mengurangi praktik *illegal fishing* khususnya yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA). Eskalasi ketegangan di kawasan Laut China Selatan juga turut meningkat. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah Indonesia harus tetap waspada dan mengoptimalkan unsur armada pengawasan dalam rangka mengawasi perairan Indonesia dari berbagai potensi tindakan *illegal fishing*. Keamanan Awak Kapal Pengawas menjadi hal utama, khususnya dalam hal perlindungan diri, sehubungan dengan hal tersebut Direktorat POA telah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 untuk AKP seperti pengadaan masker, handsanitizer, thermo gun, dan perlengkapan lain yang diperlukan. Hal ini semata-mata untuk menjaga personil tetap sehat dalam rangka melakukan pengawasan SDKP.

PERAN POKMASWAS

Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan, petani ikan, serta masyarakat maritim lainnya. POKMASWAS dibentuk atas inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh unsur pemerintah daerah, dan dikoordinir oleh seorang anggota masyarakat dalam POKMASWAS yang berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah.

Peran POKMASWAS sangat besar dalam mengungkap praktik-praktik IUU *Fishing* di Indonesia. Informasi yang diberikan oleh POKMASWAS kepada aparat penegak hukum sangat bermanfaat untuk tindakan hukum terhadap para pelaku yang tidak bertanggungjawab. Selain itu, dengan adanya informasi dari masyarakat mempermudah mengungkap dan memutus mata rantai kejahatan / aktifitas pengelolaan SDKP yang mengabaikan prinsip-prinsip sumber daya lestari,

karena sebagian masyarakat masih memilih jalan pintas misalnya dengan menggunakan bom ikan, obat bius dan penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan.

Direktorat POA dalam rangka memfasilitasi keberadaan POKMASWAS ini telah mengalokasikan anggaran ke daerah melalui alokasi dana DEKONSENTRASI, tahun 2019 sebesar Rp2,323,075,000 (dua milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi pembinaan terhadap POKMASWAS. Selain itu, dalam rangka memberi apresiasi dan memupuk semangat masyarakat untuk secara sukarela melakukan pengawasan SDKP di lapangan, Ditjen PSDKP melalui Direktorat POA melakukan penilaian dan menetapkan POKMASWAS teladan tingkat nasional dan diberi penghargaan dan apresiasi.

KAJIAN LAIK OPERASI ARMADA KAPAL PENGAWAS

Keberhasilan terhadap pengawasan SDKP tidak luput dari armada kapal pengawas yang laik operasi. Kajian dilakukan untuk evaluasi kelaikan kapal pengawas yang berusia lebih dari 10 tahun, khususnya material *fiberglass* dalam rangka menjaga keselamatan Awak Kapal Pengawas (AKP) dan mengetahui kesiapan kapal bertugas di laut. Berdasarkan hasil kajian dengan menilai beberapa aspek (keselamatan, teknis, dan operasional). Dari 34 unit kapal pengawas perikanan yang dimiliki oleh Ditjen PSDKP, 6 unit kapal pengawas dinilai tidak laik operasi di laut yaitu: (1) KP. Takalamungan, (2) KP. Padaido, (3) KP. Todak 01, (4) KP. Todak 02, (5) KP. Barracuda 01, dan (6) KP. Barracuda 02. Dari 6 unit kapal pengawas tersebut, bermaterial *fiberglass*.

HIBAH KAPAL PENGAWAS DARI PEMERINTAH JEPANG PERKUAT ARMADA PENGAWASAN

Dengan melihat keseriusan Pemerintah Indonesia dalam pemberantasan *Illegal Fishing*, Pemerintah Jepang akan menghibahkan kapal sebanyak 2 unit yaitu “Hakurei Maru” dan “Shirahagi Maru”. Kapal tersebut nantinya akan digunakan untuk memperkuat armada pengawasan SDKP Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan kemitraan yang cukup strategis antara Pemerintah Indonesia dan Jepang. Kerjasama ini di bidang kelautan dan perikanan khususnya dalam pengelolaan SDKP secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan rencana hibah tersebut, Pemerintah Indonesia melalui tim Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari beberapa unsur yaitu : Ditjen PSDKP, BPPT dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) pada tanggal 26 s.d 29 Nopember 2019 di Jepang. Untuk memastikan kapal dalam kondisi baik, telah dilakukan survey

Direncanakan pengiriman ke Indonesia pada tahun 2022, karena pada tahun 2020 masih periode akhir penugasan kapal tersebut di Jepang. Agenda perbaikan menyeluruh akan dilakukan pada tahun 2021, sehingga baru tahun 2022 kapal tersebut dikirim ke Indonesia.

Berdasarkan hasil kunjungan dan pengecekan langsung oleh Tim, kedua kapal tersebut secara fisik masih terawat dengan baik dan laik laut. Namun demikian, Tim Indonesia merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut : meminta Pemerintah Jepang untuk memastikan kapal benar-benar dalam kondisi laik operasi pada saat proses hibah, meminta manual book kapal dan mesin disiapkan dalam berbahasa Inggris dan meminta mesin diesel yang terpasang di kapal dapat bekerja dengan bahan bakar bio diesel sesuai kebijakan Pemerintah Indonesia.

SINERGITAS DALAM MELAKSANAKAN OPERASI BERSAMA

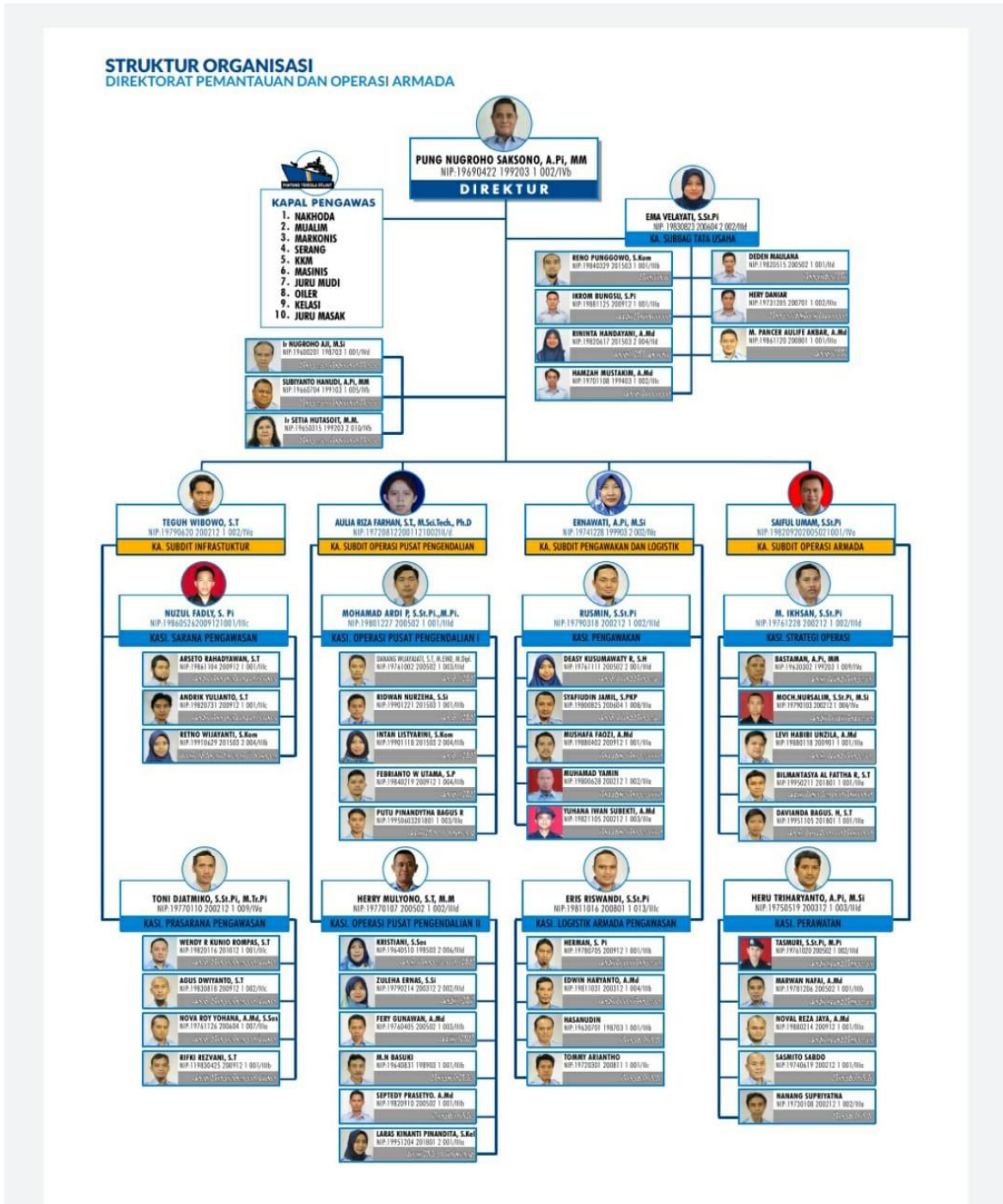
Sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, Indonesia tentu saja memiliki banyak permasalahan sehubungan dengan wilayah lautnya, Indonesia menghadapi berbagai kejahatan transnasional yang biasa terjadi dilaut seperti, *Illegal fishing*, Penyelundupan barang, Penyelundupan narkoba, *Trafficking*/Penyelundupan manusia dan boat people (manusia perahu), terorisme dan bajak laut.

Untuk menjaga wilayah laut yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki tujuh lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli di laut. Lembaga penegak hukum tersebut diantaranya adalah TNI-Angkatan Laut; POLRI-Direktorat Kepolisian Perairan; Kementerian Perhubungan-Ditjen Hubla; Kementerian Kelautan dan Perikanan-Ditjen PSDKP; Kementerian Keuangan-Dirjen Bea Cukai; Bakamla, dan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115). Ke-tujuh lembaga penegak hukum tersebut melaksanakan patroli terkait dengan keamanan dilaut secara sektoral sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan masing-masing.

Adanya beberapa Lembaga penegak hukum di laut tersebut semestinya menjadi kekuatan tersendiri bila sinergi. Luasnya perairan yang dimiliki Indonesia mengharuskan operasi Bersama dan terkoordinasi dar antar Lembaga penegak hukum di laut.

Berkaca dari permasalahan Natuna, sebagian pihak menganggap bahwa hal itu terjadi karena sering kosongnya perairan Natuna dari pengawasan. Bila hanya dibebankan kepada Direktorat Jenderal PSDKP, tentulah berat mengingat masih terbatasnya armada kapal pengawas perikanan yang dimiliki.

D. TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

1. Tugas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Tugas Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada

2. Fungsi Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan;
 - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan direktorat.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Direktorat POA secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Direktorat POA, Ditjen. PSDKP tahun 2019 serta sistematika penyajian laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan rencana strategis Ditjen. PSDKP untuk periode 2015-2019 dan perjanjian kinerja Direktorat POA tahun 2019.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan selama tahun 2019.

Bab IV Penutup

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Direktorat POA, Ditjen. PSDKP periode Tahun 2019 dan merekomendasikan perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat POA, Ditjen. PSDKP berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: ⁽¹⁾ Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2015-2019; ⁽³⁾ Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan ⁽⁴⁾ Perjanjian Kinerja Direktorat POA tahun 2019.

A. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEE dan laut lepas, dan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, untuk peningkatan pendapatan nelayan.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja dan penyediaan sumber protein hewani untuk konsumsi masyarakat.
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan.
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait.
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

B. ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapaun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periodea renstra 2015-2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;

2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP.

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP
2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut
 - b. Pertukaran data
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*).

- d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan
5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar

C. KEGIATAN PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 6/PERMEN-KP/2017, Kegiatan Pemantauan dan Operasi Armada terdiri dari 4 (empat) keluaran, yaitu:

- a. Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP;
- b. Operasional Pusat Pengendalian;
- c. Penyediaan Logistik dan Pengawasan Kapal Pengawas; dan
- d. Operasional Armada dan Perawatan.

Dalam mendukung kegiatan pemantauan dan operasi armada didukung oleh beberapa output kegiatan sebagai berikut:

- 1. Operasional Kapal Pengawas;
- 2. Operasional Pesawat Patroli;
- 3. Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi;
- 4. Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan yang siap operasi;
- 5. Supervisi Operasional Speedboat;
- 6. Perangkat Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi;
- 7. Kapal Pengawas yang Dibangun;
- 8. Speedboat Pengawas yang Dibangun;
- 9. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- 10. Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun;
- 11. Layanan Perkantoran.

D. PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT POA 2020

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Direktorat POA telah menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang berisi tekad dan janji yang akan dicapai antara Pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab. Perjanjian Kinerja tahun 2020 terdiri atas 9 Sasaran Kegiatan selama periode tahun dimana pengukurannya melalui instrument realisasi Indikator Kinerja, berdasarkan target kinerja yang akan dicapai.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1. Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)	90
		2. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas (%)	70
2	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	3. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas (%)	51
		4. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Pesawat patroli (%)	53.35
		5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (%)	4
		6. Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (Indeks)	80
2	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7. Jumlah armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi (Unit)	120
4	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	8. Indeks kinerja Operasional Kapal Pengawas (Indeks)	86.72
		9. Indeks kinerja Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (Indeks)	86.72
		10. Jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas (hari)	89
		11. Jumlah rata-rata hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (hari)	20

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		12. Jumlah rata-rata hari operasi Pesawat Patroli (hari)	70
		13. Persentase Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan (%)	100
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	14. Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA (Dokumen)	7
		15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	72
		16. Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (Nilai)	75
		17. Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis lingkup Direktorat POA (%)	80
		18. Nilai PMSAKIP lingkup Direktorat POA	87
		19. Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat POA	1
		20. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter)	80
		21. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	82
		22. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60
		23. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat POA (Nilai)	88

Dalam mendukung Sasaran Kegiatan tersebut, beberapa output kegiatan dan alokasi anggaran Direktorat POA tahun 2020 setelah penyesuaian dikarenakan Pandemi Covid-19 ditabulasikan sebagai berikut :

Tabel 3. Alokasi Anggaran Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Tahun 2020

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	Operasional Kapal Pengawas	101.785.783.000
2	Operasional Pesawat Patroli	27.877.009.000
3	Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi	8.916.474.000
4	Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan yang siap operasi	42.924.102.000
5	Perangkat Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	5.835.498.000
6	Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	309.311.000
7	Kapal Pengawas yang Dibangun	2.302.315.000
8	Speedboat Pengawas yang dibangun	408.500.000
9	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	922.749.000
10	Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun	570.610.000
11	Layanan Perkantoran	257.760.000
Anggaran Direktorat POA 2020		195.110.111.000

E. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU BSC. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi aplikasi “Kinerjaku” yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja BSC berbasis teknologi informasi.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tahun 2020

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN III 2020

Pengukuran capaian kinerja Direktorat POA triwulan III 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing Sasaran Kegiatan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa **nilai capaian kinerja Direktorat POA sebesar 107.88%** dengan indikator NPSS berwarna HIJAU . Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagaimana disajikan pada tabel Capaian Kinerja Organisasi berikut:

Dari tabel perbandingan di atas terlihat kenaikan capaian perspektif *internal process* dan *learning and growth*. *Summary* dari capaian tiap perspektif ditampilkan pada infografis berikut ini:

Tabel 4. Rincian Kegiatan, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Triwulan III 2020

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	1	Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas (%)	-	-	-
		2	Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas (%)	70	100	100.00
2	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	3	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas (%)	16	46,09	186.30
		4	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Pesawat patroli (%)	13	49.59	161.90
		5	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (%)	1	1,54	104.00
		6	Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP (Indeks)	80	114,54	104.16
3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	7	Jumlah amada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi (Unit)	-	-	-
4	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	8	Indeks kinerja Operasional Kapal Pengawas (Indeks)	-	-	-
		9	Indeks kinerja Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (Indeks)	-	-	-
		10	Jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas (hari)	81	83	102.47
		11	Jumlah rata-rata hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (hari)	11	11	100.00

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
		12	Jumlah rata-rata hari operasi Pesawat Patroli (hari)	88	96	109.09
		13	Persentase Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan (%)	100	109	109
5	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	14	Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA (Dokumen)	-	-	-
		15	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat POA (Indeks)	72	-	-
		16	Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA (Nilai)	75	0	0
		17	Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis lingkup Direktorat POA (%)	75	100	133,33
		18	Nilai PMSAKIP lingkup Direktorat POA	-	-	-
		19	Inovasi gugus kerja transformasi yang dihasilkan lingkup Direktorat POA	1	-	-
		20	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter)	80	-	-
		21	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat POA (%)	75	89,26	119.01
		22	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat POA yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	50	69,81	139,62
		23	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat POA (Nilai)	87	85,63	98.43
Nilai Capaian Kinerja Direktorat POA						107.88%

B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

SASARAN KEGIATAN 1

Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat” diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Tingkat keaktifan provinsi dalam pembinaan Pokmaswas, dan (2) Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas (%).

1

TINGKAT KEAKTIFAN PROVINSI DALAM PEMBINAAN POKMASWAS

Indikator Kinerja ini bertujuan untuk mengukur tingkat keaktifan Provinsi dalam melakukan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berada di bawah kendali pembinaanya. Salah satu tools yang digunakan adalah “form keaktifan POKMASWAS” yang disiapkan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan didistribusikan ke setiap Provinsi terkait.

DKP Provinsi wajib melakukan pembinaan terhadap POKMASWAS. Hasil pembinaan tersebut wajib dikirimkan dalam bentuk laporan pembinaan POKMASWAS dengan merujuk pada “Form Keaktifan POKMASWAS”. Pembinaan terhadap POKMASWAS dapat dilakukan setiap bulan atau menyesuaikan rencana aksi masing-masing Provinsi.

Tabel 5. Target dan realisasi IKU-1 periode triwulan III 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Tingkat Keaktifan Provinsi Dalam Pembinaan Pokmaswas	-	-	-

Pada tahun 2020, capaian IKU “Tingkat Keaktifan Provinsi Dalam Pembinaan Pokmaswas” ditargetkan sebesar **90,00%**. Adapun target pencapaian kinerja untuk periode triwulan III 2020 sebesar 0% dengan realisasi sebesar **0%**. Berdasarkan rincaian target kinerja 2020, pengukuran dilakukan pada periode triwulan IV 2020.

2

PERSENTASE TINDAK LANJUT INFORMASI POKMASWAS

Indikator kinerja “Persentase Tindak lanjut Informasi POKMASWAS IKU ini digunakan untuk mengukur tindak lanjut informasi POKMASWAS yang dilaksanakan oleh UPT/SATWAS Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Informasi yang disajikan dapat berupa :

1. Informasi melalui SMS Gateway yang akan diteruskan ke UPT/SATWAS;
2. Informasi langsung yang diberikan kepada UPT/SATWAS.

Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh UPT/SATWAS PSDKP dapat berupa:

1. Pelaksanaan patroli;
2. Melakukan pengumpulan data (pemanggilan, melaksanakan Berita Acara Pemeriksaan, dan lain-lain).

Tabel 6. Target dan realisasi IKU-2 periode triwulan III 2020

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Persentase Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS	70	100	142,86

Hingga triwulan III 2020 untuk Indikator Kinerja “Persentase Tindak Lanjut Informasi POKMASWAS” telah tercapai sebesar **142,86%**. Capaian tersebut berasal dari tindak lanjut informasi Pokmaswas yang telah dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Lampulo, Pangkalan PSDKP Batam, dan Pangkalan PSDKP Bena. Rincian laporan dan tindak lanjut informasi Pokmaswas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Daftar Tindak Lanjut Informasi Masyarakat oleh UPT PSDKP

No	UPT	Laporan Pokmaswas	Isi Laporan	Proses Tindak Lanjut
1	Pangkalan PSDKP Lampulo	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Sering terjadi pelanggaran di Desa Air, Aceh 2. Pencemaran akibat kebocoran limbah pabrik PT. BTN 3. Adanya aktivitas Pengeboman ikan di Perairan Pulau Bunta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan informasi kepada pengawas perikanan terdekat; 2. Menugaskan pengawas perikanan di Satwas SDKP Padang untuk meninjau Lokasi; 3. Melaksanakan Patroli ke lokasi kejadian.
2	Pangkalan PSDKP Batam	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maraknya nelayan menangkap ikan menggunakan trawl; 2. penggunaan jaring cawang yang merusak ekosistem 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan patroli menggunakan rubber boat tanggal 21-30 september 2020; 2. membangun komunikasi dengan pemerintah prov sumatera selatan

No	UPT	Laporan Pokmaswas	Isi Laporan	Proses Tindak Lanjut
3	Pangkalan PSDKP Benoa	2	1. Adanya Indikasi Penggunaan Potasium Sianida untuk menangkap ikan di nusa dua; 2. Adanya Indikasi Penggunaan Potasium Sianida untuk menangkap ikan di lombok timur	1. melakukan pertemuan dengan pokmaswas, melakukan pemasangan spanduk; 2. melakukan penyadartahuan kepada nelayan di lombok timur

SASARAN KEGIATAN 2

Terselenggaranya Pemantauan SDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas (2) Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Pesawat patroli, (3) Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, dan Indeks pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan untuk operasi pengawasan SDKP.

3

PERSENTASE CAKUPAN WPPNRI YANG DIPANTAU MENGGUNAKAN KAPAL PENGAWAS

Indikator Kinerja “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas” bertujuan untuk mengukur luasan cakupan WPPNRI yang berhasil diawasi oleh Direktorat Jenderal PSDKP menggunakan armada kapal pengawas (matra laut). Dengan adanya perhitungan luasan cakupan yang di awasi ini, mengkonfirmasi kehadiran Negara dalam menjaga kedaulatan wilayah khususnya kedaulatan pengelolaan sumber daya ikan di WPP-NRI.

Rincian capaian cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Target dan realisasi IKU-3 periode triwulan III 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III 2019	TARGET	REALISASI TW II 2020	%
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas	29.00	34	46.09	135.56

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator kinerja “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas” periode triwulan III 2020 adalah sebesar **46.09%** dari

target sebesar **34.00%** dengan persentase capaian sebesar **135,56%**, dan luasan WPPNRI yang diawasi sebesar sebesar **888.788 NM²**. Dengan rincian dijelaskan sebagai berikut:

Kontribusi cakupan diberikan oleh 28 unit armada kapal pengawas perikanan sebagai berikut:

Tabel 9. Daftar armada kapal pengawas Ditjen PSDKP Tahun 2020

No	Nama Kapal	No	Nama Kapal	No	Nama Kapal
1	KP Orca 01	13	KP Hiu Macan 06	25	KP Hiu 12
2	KP Orca 02	14	KP Hiu 01	26	KP Hiu 13
3	KP Orca 03	15	KP Hiu 02	27	KP Hiu 14
4	KP Orca 04	16	KP Hiu 03	28	KP Hiu 15
5	KP Hiu Macan Tutul 01	17	KP Hiu 04		
6	KP Hiu Macan Tutul 02	18	KP Hiu 05		
7	KP Paus 01	19	KP Hiu 06		
8	KP Akar Bahar 01	20	KP Hiu 07		
9	KP Hiu Macan 01	21	KP Hiu 08		
10	KP Hiu Macan 03	22	KP Hiu 09		
11	KP Hiu Macan 04	23	KP Hiu 10		
12	KP Hiu Macan 05	24	KP Hiu 11		

4

PERSENTASE CAKUPAN WPPNRI YANG DIPANTAU PESAWAT PATROLI

Indikator Kinerja “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan Pesawat Patroli” bertujuan untuk mengukur luasan cakupan WPPNRI yang berhasil diawasi oleh Direktorat Jenderal PSDKP menggunakan armada pesawat patrol udara (matra udara). Dengan adanya perhitungan luasan cakupan yang di awasi ini, mengkonfirmasi kehadiran Negara dalam menjaga kedaulatan wilayah khususnya kedaulatan pengelolaan sumber daya ikan di WPP-NRI.

Rincian capaian cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan pesawat patrol udara ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Target dan Realisasi IKU-4 periode triwulan III 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW II 2019	TARGET TW III 2020	REALISASI TW III 2020	%
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan pesawat patroli	25,83	38	49,59	130,50%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator kinerja “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan pesawat patroli udara” periode triwulan III 2020 adalah sebesar **49.59%**

dari target sebesar **38.00%** dengan persentase capaian melampaui target yaitu sebesar **130,50%**, dan luasan WPPNRI yang diawasi sebesar sebesar **956,323 NM²**. Dengan rincian dijelaskan sebagai berikut:

Selama periode operasi triwulan III 2020 telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) periode operasi dengan lokasi pangkalan operasi antara lain: Banyuwangi, Pontianak, Natuna, Medan, dan Batam. Dari pelaksanaan operasi tersebut diperoleh sebanyak 96 hari operasi. Pesawat yang digunakan antara lain : "Beechcraft King Air B200GT Beechcraft Hawker 900XP", Beechcraft King Air B200GT, Seneca IV PA-34-220T, Beechcraft King Air B200GT.

Operasi dilaksanakan secara terintegrasi dengan armada kapal pengawas di laut, antara lain :

1. Periode VII: Operasi Mandiri
2. Periode IX: ORCA 02, PAUS 01, dan HIU 12
3. Periode IX.A: ORCA 02, PAUS 01, dan HIU 12

Tabel 11. Fokus dan hasil operasi pesawat patroli s.d periode III 2020

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
I	1 dan 7-9 Januari 2020	4	Natuna	WPPNRI 711	46.732,8	KP ORCA 01, KP ORCA 02, KP HMT 02	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan aktivitas KIA asal Vietnam
II-A	10 Februari 2020	1	Jakarta	WPPNRI 712	3.523,2	-	Operasi Mandiri
II	12 - 28 Februari 2020	13	Manado dan Ternate	WPPNRI 716, 715, 713	158.592	KP Hiu 14	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan aktivitas Pumpboat KIA Filipina • Penerusan informasi ke KP terintegrasi.
III	16 - 26 Maret 2020	10	Merauke, Biak, Sorong	WPPNRI 716, 717, 718	128.795,2	KP Hiu 05, KP HIU 14	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan KKPN TWP Padaido, TN

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
							Cendrawasih, Waigeo; <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil PMA • Pemantauan aktivitas KIA dan KII
IV	6 - 7 April 2020	2	Batam	WPPNRI 711	30.708,8	KP. Orca 02 KP. Orca 03	<ul style="list-style-type: none"> • Penerusan informasi ke Kapal Pengawas • Pemantauan terhadap KIA Vietnam
IV-A	13 - 25 April 2020	9	Batam II dan Medan	WPPNRI 711, 712, 571, 572	75.953,6	KP. Orca 02, KP. Orca 03, KP. HMT 02, KP. Hiu 08 KP. Hiu 12	<ul style="list-style-type: none"> • Penerusan informasi ke Kapal Pengawas • Pemantauan terhadap KIA di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara • Pemantauan terhadap KII Mini Otter Trawl di Perairan Lampung Timur dan Tanjung Balai Asahan

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
IV-B	22-23 April 2020 dan 28 - 30 April 2020	5	Batam III	WPPNRI 711	56.553,6	KP. ORCA 02	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan Misi SAR dengan KP. ORCA 02 Pemantauan aktivitas KIA dan KII
V	7 - 19 Mei 2020	11	Manado II dan Ternate	WPPNRI 712, 715, 716, 714, 713	89.465,6	KP Orca 01, KP Orca 04, KP Hiu 15	<ul style="list-style-type: none"> Adhoc 1 KIA Philipina Pemantauan aktivitas kapal cantrang di Laut Jawa dan operasional FAD di di Teluk Tomini dan Laut Sulawesi
VI	8 - 12 Juni 2020 dan 15 - 18 Juni 2020	9	Manado III dan Batam III	WPPNRI 716, 711	118.201,6	KP Orca 02 KP Hiu 11	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan aktivitas KIA di WPPNRI 711 Laut Natuna Utara
VI-A	22 Juni - 6 Juli 2020	10	Surabaya dan Nusa Tenggara	WPPNRI 573, 713	72.025,6	Satwas PSDKP Lombok dan Stasiun PSDKP Kupang	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan aktivitas KII Pemantauan operasional jaring penangkap benih lobster di perairan Lombok

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
VII	10 Juli dan 21 Juli 2020	2	Banyuwangi dan Pontianak	WPPNRI 712 dan 711	13.804,8	-	Operasi Mandiri
IX	2 September dan 7 – 28 September 2020	14	Natuna III dan Medan II	WPPNRI 712, 711, dan 571	82.688	KP ORCA 02, KP PAUS 01, KP HIU 12	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan aktivitas KIA Malaysia dan Vietnam • Adhoc 1 KIA Malaysia oleh KP Hiu 12
IXA	24 – 30 September 2020	6	Batam V	WPPNRI 711	79.278,4	KP ORCA 02, KP PAUS 01, KP HIU 11	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan aktivitas KIA Vietnam • Operasi SAR Kecelakaan Kapal Nelayan KM. Laura di Perairan Anambas
Total Hari Operasi		96	Total Coverage Area (NM²)		956.323,2		

5

PERSENTASE CAKUPAN WPP NRI YANG DIPANTAU MENGGUNAKAN SPEED BOAT/RIGID INFLATABLE BOAT/RUBBER BOAT

Indikator Kinerja “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan *Speedboat* Pengawas” bertujuan untuk mengukur luasan cakupan WPPNRI yang berhasil diawasi oleh Direktorat Jenderal PSDKP menggunakan armada speedboat pengawas (bagian dari matra laut). Dengan adanya perhitungan luasan cakupan yang diawasi ini, mengkonfirmasi kehadiran Negara dalam menjaga kedaulatan wilayah khususnya kedaulatan pengelolaan sumber daya ikan di WPP-NRI menggunakan armada Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat yang tersebar di seluruh Indonesia baik yang dimiliki oleh UPT Ditjen PSDKP maupun Satker DKP Provinsi.

Rincian capaian cakupan WPP-NRI yang dipantau menggunakan speedboat pengawas ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Target dan Realisasi IKU-5 Periode Triwulan III 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW II 2019	TARGET TW III 2020	REALISASI TW III 2020	%
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	0,80	1,3	1,54	118,46%

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator kinerja “Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat” periode triwulan III 2020 adalah sebesar **1,54%** dari target sebesar **1,3%** dengan persentase capaian sebesar **118,46%**, dan luasan WPPNRI yang diawasi sebesar sebesar **29.659 NM2**. Dengan rincian dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah armada Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat yang tercatat pada database Direktorat POA sebanyak 128 unit.
2. Dari jumlah armada tersebut, sebanyak 25 unit Speedboat terpantau belum melaksanakan operasi, hal tersebut diperoleh informasi dari laporan yang masuk, dimana jumlah laporan hasil operasi triwulan III 2020 hanya 103 unit speedboat yang sudah beroperasi. Berdasarkan hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Direktorat POA, bahwa sebagian speedboat dalam proses perbaikan, dan Sebagian yang lain akan beroperasi pada triwulan III, dikarenakan kendala Covid-19 dimana terdapat larangan perjalanan dinas di sejumlah Provinsi oleh Gubernur setempat.
3. Total jam operasi sejumlah **7.414** jam dengan capaian jumlah rata-rata hari operasi sebanyak 11 hari.

6

INDEKS PEMENUHAN DATA DAN ANALISIS HASIL PEMANTAUAN UNTUK OPERASI PENGAWASAN SDKP

Indikator Kinerja “Indeks Pemenuhan Data dan Analisa Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKKP” bertujuan untuk mendukung operasi pengawasan SDKP merupakan pengukuran pemenuhan data dan analisis hasil pemantauan yang disiapkan oleh Direktorat POA kepada user pengguna hasil analisis. Analisis yang diberikan bersumber dari data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) dan Automatic Identification System (AIS).

Rincian capaian IKU 6 Direktorat POA periode triwulan III 2020 ditabulasikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU-6 Periode Triwulan III 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWII 2019	TARGET TWIII 2020	REALISASI TWIII 2020	%
Indeks Pemenuhan Data dan Analisa Hasil Pemantauan Untuk Operasi Pengawasan SDKP	-	80	91.66	114,58%

Indikator ini merupakan Indikator baru untuk tahun 2020, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian melampaui target yang ditetapkan, target untuk triwulan III 2020 sebesar 80% dengan capaian 91.66 dengan persentase capaian sebesar 114.58%. Dari capaian tersebut mengindikasikan bahwa Direktorat POA senantiasa melakukan pemenuhan kebutuhan data dan analisis hasil pemantauan yang digunakan untuk kebutuhan operasi pengawasan SDKP.

Pemenuhan analisis data pada periode triwulan III 2020 meliputi: Indikasi Pelanggaran Kapal Perikanan, Kebutuhan Operasi Kapal Pengawas, Kebutuhan Operasi Pesawat Patroli, Analisis Pergerakan Kapal Pengangkut Ikan Hidup, dan Pemantauan Kapal Perikanan di 10 (sepuluh) Wilayah Konservasi Nasional

SASARAN KEGIATAN 3

Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Jumlah kapal pengawas yang dibangun (2) Jumlah speedboat pengawas yang dibangun, (3) Jumlah Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun, (4) Jumlah armada Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi.

7

JUMLAH AMADA PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG SIAP OPERASI

Jumlah armada kapal pengawas perikanan Ditjen. PSDKP triwulan III 2020 sebanyak 120 unit yang terdiri dari 28 unit kapal pengawas dan 92 unit *speedboat* pengawas. Tolok ukur kinerja armada pengawasan ditetapkan melalui IKU “jumlah armada pengawasan siap operasi” sebanyak 28 unit.

kondisi kapal pengawas siap operasi, dilakukan upaya pemeliharaan yang terdiri dari pemeliharaan rutin bulanan, perawatan tahunan (*docking*), perbaikan darurat/mendesak, dan memastikan ketersediaan suku cadang (*spare part*) dan perlengkapan kapal pengawas.

Tabel 16. Target dan Realisasi IKU-10 Periode Triwulan III 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWIII 2019	TARGET TWIII 2020	REALISASI TWIII 2020	%
Jumlah armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang siap operasi	-	-	-	-

Berdasarkan rincian target kinerja, pengukuran kinerja akan dilaksanakan pada triwulan IV 2020.

SASARAN KEGIATAN 4

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Indeks kinerja Operasional Kapal Pengawas (2) Indeks kinerja Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, (3) Jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas, (4) Jumlah rata-rata hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat, (5) Jumlah rata-rata hari operasi Pesawat Patroli, (6) Persentase Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan.

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Kapal Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;
2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal;
8. Dukungan Kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, dan Internasional;
9. Dukungan Kegiatan Sosial dan Penyelamatan.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja dari seluruh armada Kapal Pengawas maupun Speedboat Pengawas yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU-11 Periode Triwulan III 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Indeks Kinerja Operasional Kapal Pengawas	-	-	-	-

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2020 sehingga tentu realisasi tidak dapat dibandingkan antara tahun 2020 dengan tahun 2019. Hingga triwulan III 2020 untuk IKU ini belum ada realisasi, pengukuran akan dilakukan pada periode triwulan IV 2020.

Indeks Kinerja adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Indeks Kinerja Operasional Speedboat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speedboat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Indeks Kinerja Operasional Speedboat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat terdiri dari indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

1. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa;

2. Persentase Coverage Area Pengawasan;
3. Persentase Capaian Hari Operasi;
4. Persentase Jumlah Tindak Lanjut atas Target Operasi yang diberikan;
5. Jumlah Tangkapan Kapal Pelaku IUU Fishing;
6. Jumlah Penyitaan Alat Tangkap Terlarang;
7. Jumlah Pemutusan Rumpon Ilegal;
8. Dukungan Kegiatan Kapal Pengawas terhadap Kegiatan Nasional, Regional, dan Internasional;
9. Dukungan Kegiatan Sosial dan Penyelamatan.

Dengan adanya IKU ini diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Direktorat POA untuk menilai kinerja dari seluruh armada Kapal Pengawas maupun Speedboat Pengawas yang pada akhirnya menjadi pemicu dalam meningkatnya kinerja pengawasan.

Tabel 18. Target dan Realisasi IKU-12 Periode Triwulan III 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Indeks Kinerja Operasional Speedboat/Rigid Inflatable Boat/ Rubber Boat	-	-	-	-

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2020 sehingga tentu realisasi tidak dapat dibandingkan antara tahun 2020 dengan tahun 2019. Hingga triwulan III 2020 untuk IKU ini belum ada realisasi, pengukuran akan dilakukan pada periode triwulan IV 2020.

10

JUMLAH RATA-RATA HARI OPERASI KAPAL PENGAWAS

Indikator “Jumlah Rata-Rata Hari Operasi Kapal Pengawas” bertujuan untuk mengukur capaian hari operasi yang diperoleh kapal pengawas perikanan Direktorat Jenderal PSDKP. Capaian hari operasi merupakan salah satu tolok ukur dari capaian kinerja Direktorat POA yang sangat dominan. Hal ini karena sebagian besar komponen anggaran pada Direktorat POA diperuntukkan bagi tersedianya logistik kapal pengawas/Bahan Bakar Minyak (BBM).

Tanpa BBM tentunya Kapal Pengawas Perikanan tidak bisa melaksanakan operasi pengawasan. Besar kecilnya hari operasi sangat berpengaruh terhadap kinerja pengawasan di laut. Semakin banyak alokasi anggaran semakin memberikan kesempatan kepada armada kapal pengawas untuk siap melaksanakan operasi pengawasan SDKP.

Target hari operasi Kapal Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal PSDKP untuk tahun 2020 sebesar 89 hari operasi dan 81 hari target selama periode triwulan III 2020 (target untuk 28 unit Kapal Pengawas). Target hari operasi tersebut bersifat rata-rata, sehingga target untuk masing-masing kapal tidaklah sama. Hingga akhir triwulan III 2020, realisasi rata-rata hari operasi Kapal Pengawas, Ditjen PSDKP telah tercapai sebesar 83 hari operasi dengan rata-rata jam layar sebesar 10.77 jam per hari. Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 capaian triwulan III 2020 terlihat lebih tinggi.

Capaian tersebut telah melampaui target yaitu 81 hari. Besarnya capaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Perencanaan operasi yang baik sehingga pelaksanaan menjadi lebih terarah;
- Sebagian besar armada kapal pengawas dalam kondisi siap operasi setelah pada akhir tahun 2019 menjalani perbaikan/perawatan maupun *docking*.

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU-13 Periode Triwulan III 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III 2019	TARGET TW III 2020	REALISASI TW III 2020	%
Jumlah Rata-Rata Hari Operasi Kapal Pengawas	46	81 hari	83 hari	102,47

Tabel 20. Target dan realisasi hari operasi kapal pengawas perikanan 2015-2020

TAHUN	TARGET HARI OPERASI	CAPAIAN HARI OPERASI	%
2014	66	73	110.61
2015	280	270	96.43
2016	144	138	95.83
2017	136	131	96.32
2018	145	122	84.14
2019	84	88	103.53
2020*	89	83	93,25

*Data sampai dengan triwulan III 2020

11

JUMLAH RATA-RATA HARI OPERASI SPEED BOAT/RIGID INFLATABLE BOAT/RUBBER BOAT

Indikator “Jumlah Rata-Rata Hari Operasi Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat” bertujuan untuk mengukur capaian hari operasi yang diperoleh speedboat pengawas Direktorat Jenderal PSDKP. Direktorat POA selaku Pembina teknis di bidang pengoperasian Kapal Pengawas dan *Speedboat* Pengawas lingkup pusat dan UPT senantiasa melakukan kontrol terhadap capaian operasi Kapal Pengawas maupun *Speedboat* Pengawas. Selain melakukan fungsi kontrol dan konsultasi, Direktorat POA juga melakukan supervisi ke lapangan untuk melihat dan memastikan operasi sesuai dengan jadwal serta mengetahui lebih dekat kendala-kendala teknis yang terjadi. Akan tetapi sampai dengan periode triwulan III 2020 telah dilakukan supervisi ke lapangan.

Tabel 21. Target dan Realisasi IKU-14 Periode Triwulan III 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW II 2019	TARGET TW II 2020	REALISASI TW II 2020	%
Jumlah Rata-Rata Hari Operasi Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	-	11 hari	11 hari	100.28

Berdasarkan data pada tabel 21 terlihat bahwa capaian hari operasi *speedboat* melampaui target pada triwulan III 2020. Realisasi ini sejalan dengan rencana operasi yang telah disusun, sehingga diharapkan pencapaian kinerja pada tahun 2020 dapat berjalan sesuai rencana.

Rekapitulasi laporan yang masuk ke Direktorat POA Cq. Subdit Operasi Armada, diperoleh data realisasi rata-rata hari operasi Speedboat Pengawas periode triwulan III 2020 sebanyak 11 hari dengan rata jam operasi per hari sebanyak 5,5 jam. Rata-rata tersebut diperoleh dari Satker UPT PSDKP dan DKP Provinsi. Dari operasi yang dilakukan selama triwulan III 2020 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 22. Hasil Operasi Speedboat Periode Triwulan II 2020

	KII	KIA	JUMLAH
RIKSA	2962	0	2962
TANGKAP	3	0	3
SITA ALAT TANGKAP	55	0	55

Tabel 23. Capaian hari operasi speedboat pengawas 2019-2020

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	30	31	103.33
2020	20	11	55.00

Capaian s/d triwulan III 2020

12

JUMLAH RATA-RATA HARI OPERASI PESAWAT PATROLI

Indikator Kinerja “Jumlah hari operasi pesawat patroli” bertujuan untuk mengukur realisasi hari operasi pengawasan SDKP yang dilakukan dari matra udara. Target hari operasi pesawat patroli udara untuk tahun 2020 sebesar 123 hari operasi. Pelaksanaan Operasi Matra Udara dilakukan secara terintegrasi dengan unsur Kapal Pengawas Perikanan, baik Kapal Pengawas Pusat maupun UPT PSDKP, serta kerja sama lain sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 24. Target dan realisasi IKU-15 periode triwulan III 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW II 2019	TARGET TW II 2020	REALISASI TWII 2020	%
Jumlah Rata-Rata Hari Operasi Pesawat Patroli	41	88 hari	96 hari	109.09%

Hingga triwulan III 2020, capaian IKU “Jumlah hari operasi pesawat patroli dalam rangka pengawasan kegiatan IUU *fishing* dan merusak SDKP di WPPNRI” sebesar 88 hari dari target 96 Hari. Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui udara (*Airborne Surveillance*) s.d periode triwulan III 2020 telah dilaksanakan sebanyak 13 periode dan mencakup *coverage area* sejumlah 956.323 Nm². Pelaksanaan Operasi Matra Udara dilakukan secara terintegrasi dengan unsur Kapal Pengawas Perikanan, baik Kapal Pengawas Pusat maupun UPT PSDKP.

Berdasarkan capaian sebagaimana dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa realisasi hari operasi telah berjalan sesuai dengan rincian target kinerja bahkan melampaui target. Rincian pelaksanaan hari operasi pesawat patroli ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian pelaksanaan operasi udara sd September 2020

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
I	1 dan 7-9 Januari 2020	4	Natuna	WPPNRI 711	46.732,8	KP ORCA 01, KP ORCA 02, KP HMT 02	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan aktivitas KIA asal Vietnam
II-A	10 Februari 2020	1	Jakarta	WPPNRI 712	3.523,2	-	Operasi Mandiri
II	12 – 28 Februari 2020	13	Manado dan Ternate	WPPNRI 716, 715, 713	158.592	KP Hiu 14	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan aktivitas Pumpboat KIA Filipina Penerusan informasi ke KP terintegrasi.

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
III	16 – 26 Maret 2020	10	Merauke, Biak, Sorong	WPPNRI 716, 717, 718	128.795,2	KP Hiu 05, KP HIU 14	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan KKPN TWP Padaido, TN Cendrawasih, Waigeo; • Pemantauan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil PMA • Pemantauan aktivitas KIA dan KII
IV	6 – 7 April 2020	2	Batam	WPPNRI 711	30.708,8	KP. Orca 02 KP. Orca 03	<ul style="list-style-type: none"> • Penerusan informasi ke Kapal Pengawas • Pemantauan terhadap KIA Vietnam
IV-A	13 – 25 April 2020	9	Batam II dan Medan	WPPNRI 711, 712, 571, 572	75.953,6	KP. Orca 02, KP. Orca 03, KP. HMT 02, KP. Hiu 08 KP. Hiu 12	<ul style="list-style-type: none"> • Penerusan informasi ke Kapal Pengawas • Pemantauan terhadap KIA di Selat Malaka dan Laut Natuna Utara • Pemantauan terhadap KII Mini Otter Trawl di Perairan Lampung Timur

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
							dan Tanjung Balai Asahan
IV-B	22-23 April 2020 dan 28 - 30 April 2020	5	Batam III	WPPNRI 711	56.553,6	KP. ORCA 02	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Misi SAR dengan KP. ORCA 02 • Pemantauan aktivitas KIA dan KII
V	7 - 19 Mei 2020	11	Manado II dan Ternate	WPPNRI 712, 715, 716, 714, 713	89.465,6	KP Orca 01, KP Orca 04, KP Hiu 15	<ul style="list-style-type: none"> • Adhoc 1 KIA Philipina • Pemantauan aktivitas kapal cantrang di Laut Jawa dan operasional FAD di di Teluk Tomini dan Laut Sulawesi
VI	8 - 12 Juni 2020 dan 15 - 18 Juni 2020	9	Manado III dan Batam III	WPPNRI 716, 711	118.201,6	KP Orca 02 KP Hiu 11	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan aktivitas KIA di WPPNRI 711 Laut Natuna Utara
VI-A	22 Juni - 6 Juli 2020	10	Surabaya dan Nusa Tenggara	WPPNRI 573, 713	72.025,6	Satwas PSDKP Lombok dan Stasiun PSDKP Kupang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan aktivitas KII • Pemantauan operasional jaring penangkap benih lobster di perairan Lombok

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Hari Ops	Pangkalan Operasi	Sektor Operasi	Coverage Area (NM ²)	Integrasi Operasi	Hasil Langsung Operasi Integrasi
VII	10 Juli dan 21 Juli 2020	2	Banyuwangi dan Pontianak	WPPNRI 712 dan 711	13.804,8	-	Operasi Mandiri
IX	2 September dan 7 – 28 September 2020	14	Natuna III dan Medan II	WPPNRI 712, 711, dan 571	82.688	KP ORCA 02, KP PAUS 01, KP HIU 12	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan aktivitas KIA Malaysia dan Vietnam • Adhoc 1 KIA Malaysia oleh KP Hiu 12
IXA	24 – 30 September 2020	6	Batam V	WPPNRI 711	79.278,4	KP ORCA 02, KP PAUS 01, KP HIU 11	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan aktivitas KIA Vietnam • Operasi SAR Kecelakaan Kapal Nelayan KM. Laura di Perairan Anambas
Total Hari Operasi		96	Total Coverage Area (NM²)		956.323,2		

Kesehatan merupakan kunci dari keberhasilan kegiatan pengawasan. Untuk memantau Kesehatan AKP setiap tahun dilakukan medical check up oleh rumah sakit Angkatan Laut/atau rumah sakit pemerintah lainnya yang ditunjuk/memiliki Kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka menjaga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan/medical check up, telah disusun IKU “Persentase AKP yang memperoleh pemeriksaan Kesehatan rutin tahunan” dengan tujuan untuk mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemeriksaan kesehatan rutin tahunan.

Tabel 26. Rincian target dan realisasi IKU-16 periode triwulan III 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TW III 2020	REALISASI TW III 2020	%
Persentase AKP yang memperoleh pemeriksaan Kesehatan rutin tahunan	-	100	109	109.00

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa IKU ini merupakan IKU baru yang muncul di tahun 2020, sehingga tidak dapat dilakukan analisis dan komparasi data capaian dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Data capaian untuk periode triwulan III 2020 yaitu 109.00% yaitu sebanyak 109 awak kapal pengawas melakukan *medical check up*.

SASARAN KEGIATAN 5

Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: (1) Tingkat pemahaman peserta Bimtek lingkup Direktorat POA, dan (2) Tingkat kelulusan peserta Diklat teknis lingkup Direktorat POA.

Jumlah rancangan kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP yang disusun lingkup Direktorat POA tahun 2020 berjumlah 7 rancangan antara lain:

1. Petunjuk teknis Perawatan Tahunan (Docking) Kapal Pengawas Perikanan;
2. Petunjuk teknis Penyiapan Suku Cadang Kapal Pengawas Perikanan
3. Petunjuk teknis pembinaan pokmaswas;
4. Petunjuk teknis pendaftaran SKAT Online;
5. Petunjuk teknis sanksi administrasi
6. Petunjuk teknis Pengembangan Infrastruktur Pengawasan SDKP
7. Petunjuk teknis Pembinaan Awak Kapal Pengawas

Sampai dengan triwulan III 2020 capaian masih 0%, progress masih dalam tahap penyiapan draft bahan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Direncanakan pengukuran dilakukan pada periode triwulan IV 2020.

15

INDEKS PROFESIONALITAS ASN LINGKUP DIREKTORAT POA

Pengukuran capaian indikator kinerja ini menggunakan 4 variabel, yaitu : ¹⁾ Kualifikasi; ²⁾ Kompetensi; ³⁾ Kinerja; dan ⁴⁾ Disiplin, dengan formula sebagai berikut:

- ASN Struktural :

$$\frac{(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklatpim} + \text{Diklat20 oj} + \text{Seminar})/3)}{3} + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$$
- ASN Fungsional :

$$\frac{(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklatfungsional} + \text{Diklat20 oj} + \text{Seminar})/3)}{3} + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$$
- ASN Staf :

$$\frac{(\text{Nilai Kualifikasi}) + (\text{Kompetensi}(\text{Diklat20 oj} + \text{Seminar})/3)}{3} + (\text{Nilai Skp}) + (\text{Nilai Disiplin})$$

Hingga triwulan III 2020 capaian IKU ini masih 0%, pengukuran akan dilakukan pada triwulan IV 2020

16

TINGKAT PEMAHAMAN PESERTA BIMTEK LINGKUP DIREKTORAT POA

IKU ini digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman Peserta BIMTEK yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. Nilai Tingkat Pemahaman dari Peserta BIMTEK diperoleh dari Ujian/Test yang dilakukan sesudah materi BIMTEK diberikan (Post Test). BIMTEK lingkup Direktorat POA tahun 2020 antara lain :

1. BIMTEK Manajemen Proyek, Subdit Infrastruktur ;
2. BIMTEK Perawatan Kapal Pengawas (ISM Code, Risk Assessment Training, SIRIKA, Pengecatan Kapal Pengawas, dan Pengelasan), Subdit Operasi Armada;

3. BIMTEK Aplikasi SKAT Online, Subdit Operasi PUSDAL.

Tabel 27. Target dan realisasi IKU-18 periode triwulan III 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TWI 2020	REALISASI TWI 2020	%
Tingkat pemahaman peserta BIMTEK lingkup Direktorat POA	-	75	0	0

Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2020 yang tidak ada di tahun sebelumnya/2019. Berdasarkan tabel 27 terlihat bahwa realisasi untuk periode triwulan III tahun 2020 tidak tercapai, hal tersebut dikarenakan pada triwulan III sedang dilakukan penyesuaian anggaran dampak dari pandemi covid-19.

17

TINGKAT KELULUSAN PESERTA DIKLAT TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT POA

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman peserta Diklat Teknis yang dilaksanakan oleh Direktorat POA. Tingkat Kelulusan dari Peserta Diklat Teknis Lingkup Direktorat POA diperoleh dari perhitungan hasil kelulusan keseluruhan peserta yang mengikuti Diklat. Diklat yang diselenggarakan oleh Direktorat POA tahun 2020 antara lain : GMDSS, AFF, MFA, SCRB, dan SSO.

Sampai dengan triwulan III 2020 indikator ini telah tercapai 100 dari target 75 yaitu sekitar 133,33%. Adapun telah dilaksanakan Diklat SSO sebanyak 25 orang, Diklat SCRB sebanyak 25 orang, Diklat AFF sebanyak 25 orang, dan Diklat MFA sebanyak 25 orang.

Tabel 28. Target dan realisasi IKU-19 periode triwulan III 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TWI 2019	TARGET TW III 2020	REALISASI TW III 2020	%
Tingkat Kelulusan Peserta Diklat Teknis Lingkup Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada	-	75	100	133.33

SAKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Hingga triwulan III 2020 capaian untuk indikator kinerja ini masih 0%, pengukuran direncanakan pada triwulan IV 2020.

Tujuan utama dilaksanakannya reformasi birokrasi adalah melakukan perbaikan tata kelola birokrasi secara terus-menerus (*improved bureaucracy*) pada delapan area perubahan, yaitu: Organisasi, Peraturan perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Pelayanan Publik, Tata Laksana, Akuntabilitas serta Pola Pikir dan Budaya Kerja;

Perubahan yang diharapkan pada 8 (delapan) Area Perubahan tersebut adalah perubahan yang partisipatif dengan cara mendorong peran serta pegawai dalam seluruh proses perubahan untuk mencari, menemukan dan menerapkan konsep dan mekanisme/metode baru (inovasi), yang memberikan daya ungkit (*leverage*) bagi perubahan/transformatasi yang bermanfaat bagi masyarakat, instansi pemerintah maupun pegawainya;

Penciptaan Inovasi yang dilakukan pada lingkup Ditjen. PSDKP menggunakan pendekatan *Total Quality Management* (TQM) dengan menerapkan 8 langkah dan 7 alat melalui Gugus Kendali Mutu (kelompok) dan Sistem Sumbang Saran (individu).

Hingga triwulan III 2020 capaian untuk indikator kinerja ini masih 0%, pengukuran dilaksanakan pada periode triwulan IV 2020.

Indikator Kinerja Utama ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna layanan SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter). Untuk mengukur hal tersebut dilakukan dengan metode survey. Survey dilakukan selama 2 (dua) kali yaitu pada semester I dan Semester II Tahun 2020.

Hingga triwulan III 2020 capaian untuk indikator kinerja ini masih 0%, pengukuran direncanakan pada triwulan IV 2020.

Indikator “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar” merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur persentase unit kerja dalam menerapkan aplikasi manajemen pengetahuan (<https://kinerjakp.bitrix24.com>).

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Komponen penilaian pengukuran Manajemen Pengetahuan KKP antara lain: Keikutsertaan, Dokumen Kinerja, dan Keaktifan.

a. Keikutsertaan

Minimal unit eselon I sampai dengan eselon IV

b. Dokumen

Beberapa dokumen yang harus diupload sebagai dokumen pengetahuan antara lain : Rencana Strategis 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Laporan Kinerja dan Interim, Rencana Kerja RB, Rencana Aksi Kinerja.

c. Keaktifan

Keaktifan berupa senantiasa melakukan upload informasi/pengetahuan. Pimpinan unit eselon I sampai dengan staf wajib melakukan upload.

Informasi yang dishare pada aplikasi harus memenuhi 5w1H, yaitu: *Who (tentang siapa), What (Apa yang terjadi), Where (dimana peristiwa terjadi), When (kapan peristiwa terjadi), Why (mengapa hal itu terjadi), dan How (bagaimana hal itu terjadi).*

Tabel 29. Target dan realisasi IK-21 periode triwulan III 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III 2019	TARGET TW III 2020	REALISASI TW III 2020	%
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	91.67%	75%	89,26%	119,01%

Berdasarkan tabel 30 terlihat target untuk triwulan III 2020 sebesar 75% dengan capaian sebesar 89,26%, hal ini mengindikasikan bahwa realisasi telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 119,01%, namun lebih tinggi rendah dari periode yang sama tahun 2019. Hal tersebut juga dikarenakan naiknya jumlah target di Triwulan III sebesar 75%. Tingginya capaian tersebut karena terjadi peningkatan keaktifan dan keikutsertaan lingkup Direktorat POA pada aplikasi manajemen pengetahuan.

22

PERSENTASE JUMLAH REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN LINGKUP DIREKTORAT POA YANG DOKUMEN TINDAK LANJUTNYA TELAH DILENGKAPI DAN DISAMPAIKAN

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2019 s.d. 30 September 2020 atau Triwulan IV Tahun 2019 s.d. Triwulan III Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 60% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

Pada tahun 2020 Direktorat POA memiliki 10 temuan dengan 43 saran yang harus dituntaskan tindaklanjutnya pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut sampai dengan triwulan III 2020 Direktorat POA telah menindaklanjuti hasil pengawasan sebanyak 43 (tuntas : 37 dan proses : 6).

Tabel 30. Target dan realisasi IK-23 periode triwulan III 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III 2019	TARGET TW III 2020	REALISASI TW III 2020	%
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat POA yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan	-	50	69.81	139.62

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa realisasi sampai dengan triwulan III 2020 mencapai 69,81 atau melampaui dari yang ditergetkan pada Triwulan III dengan persentase capaian sebesar 139,62%. Hal ini mengindikasikan bahwa Direktorat POA sangat fokus dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan dari Inspektorat Jenderal KKP, dalam rangka proses perbaikan dan akuntabilitas kinerja.

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN (Bendahara Umum Negara) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L;

Penilaian atas kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari beberapa Indikator Pelaksanaan Anggaran antara lain : Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, Kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan. Perhitungan ini diperoleh dari data OM SPAN Kemenkeu dirilis secara otomatis setiap bulan. Berdasarkan perhitungan untuk target dan realisasi indikator kinerja ini ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 31. Target dan realisasi IK-28 periode triwulan III 2020

INDIKATOR KINERJA	REALISASI TW III 2019	TARGET TW III 2020	REALISASI TW III 2020	%
Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat POA	88.00	87	85.63	98.43

Sampai dengan triwulan III 2020 nilai kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat POA tercapai sebesar 85.63% dari target 87% atau persentase capaian sebesar 98.43%. Dari data tersebut terlihat untuk indicator kinerja ini pada triwulan III 2020 belum tercapai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Terdapat ketidaksesuaian anantara RPD dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III
- b. Belum optimalnya penyerapan anggaran di masa pandemi covid 19

Rincian Nilai IKPA Direktorat POA periode triwulan III 2020 sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : SEPTEMBER

No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Renkas	Kesalahan SPM			
1	175	440551	DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN OPERASI ARMADA	Nilai	100.00	43.83	100.00	75.00	63.00	100.00	100.00	82.83	84.78	98.18	99.74	100.00	95.00	85.63	100%	85.63
				Bobot	5	5	5	15	8	5	5	15	12	10	5	5				
				Nilai Akhir	5.00	2.19	5.00	11.25	5.04	5.00	5.00	12.42	10.17	9.82	4.99	5.00	4.75			
				Nilai Aspek	81.28			84.50				91.38				97.50				

Disclaimer:

1) Modul Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran menampilkan data transaksi untuk periode Januari s.d. Desember 2020 sesuai parameter periode yang dipilih. Nilai indikator pada modul ini ditampilkan untuk kepentingan pemeliharaan data dan manajerial, serta tidak menjadi basis penilaian IKPA OMSPAN oleh BUN.
2) Untuk mengakses nilai IKPA yang menjadi basis penilaian kembali IKPA dalam S-514.PB.2020 tanggal 17 Juli 2020 tentang Penilaian IKPA K/L Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN, silahkan akses modul Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Reaktivasi).

Gambar 2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan III 2020

REALISASI ANGGARAN DAN ANALISIS SUMBER DAYA

Realisasi anggaran Direktorat POA triwulan III 2020 adalah sebesar **Rp101.804.453.359** atau **52.18%** dari pagu **Rp195.110.111.000**. Realisasi anggaran tersebut bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 lebih tinggi, realisasi triwulan III 2019 sebesar **Rp. 82,117,659,996**, hal ini dipengaruhi oleh beberapa kegiatan pengawasan yang tetap dilaksanakan ditengah Pandemi Covid 19.

Tabel 32. Rekap Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA Per 30 September 2020

Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)	% Sisa
Operasional Kapal Pengawas	101,785,783,000	68,050,136,490	66.86	33,735,646,510	33.14
Operasional Pesawat Patroli	27,877,009,000	14,701,106,873	52.74	13,175,902,127	47.26
Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi	8,916,474,000	6,028,963,752	67.62	2,887,510,248	32.38
Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan yang Siap Operasi	45,924,102,000	8,346,139,834	18.17	37,577,962,166	81.83
Perangkat Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	5,835,498,000	3,021,142,822	51.77	2,814,355,178	48.23
Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	309,311,000	168,944,913	54.62	140,366,087	45.38
Kapal Pengawas yang Dibangun	2,302,315,000	584,035,337	25.37	1,718,279,663	74.63
Speedboat Pengawas yang dibangun	408,500,000	51,007,500	12.49	357,492,500	87.51
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam	922,749,000	355,102,178	38.48	567,646,822	61.52
Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun	570,610,000	335,153,660	58.74	235,456,340	41.26

Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)	% Sisa
Layanan Perkantoran	257,760,000	162,720,000	63.13	95,040,000	36.87
TOTAL	195,110,111,000	101,804,453,359	52.18	93,305,657,641	47.82

Tabel 33. Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran Satker Direktorat POA 2018-2020

OUTPUT KEGIATAN	Anggaran 2018		Anggaran 2019		Anggaran 2020	
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Operasional Kapal Pengawas	167,033,431,000	111,340,712,829	76,049,753,000	73,604,092,876	101,785,783,000	44,119,783,443
Operasional Pesawat Patroli	22,500,000,000	21,451,370,262	14,448,000,000	14,083,758,779	27,877,009,000	9,824,740,793
Awak Kapal Pengawas Yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi	1,000,000,000	749,919,566	13,074,947,000	11,984,713,317	8,916,474,000	3,702,240,194
Armada dan Sistem Siap Operasi	15,887,400,000	15,474,158,012	28,046,705,000	23,463,912,637	45,924,102,000	3,243,275,749
Perangkat Sistem Yang Operasional dan Terintegrasi	10,372,670,000	1,812,820,013	4,324,125,000	3,951,217,093	5,835,498,000	1,563,554,855
Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	-	-	-	-	309,311,000	0
Kapal Pengawas yang Dibangun	18,000,000,000	-	-	-	2,302,315,000	349,195,700
Speedboat Pengawas yang Dibangun	5,000,000,000	-	-	-	408,500,000	46,388,000
Unit Usaha yang Dipantau	500,000,000	332,817,503	-	-	-	-
POKMASWAS Yang Aktif Membantu Pengawasan SDKP	423,430,000	365,789,418	481,924,000	390,236,615	922,749,000	183,804,507
Bangunan/Pos Pengawasan Sdkp Yang Dibangun	350,000,000	173,106,462	400,000,000	377,669,118	570,610,000	90,430,481
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	60,000,000	57,370,000	50,000,000	49,830,000	-	-
Layanan Dukungan Manajemen Satker	1,819,716,000	1,372,626,857	979,506,000	675,507,772	-	-
Layanan Perkantoran	2,906,465,000	2,065,593,436	2,944,274,000	2,290,294,081	257,760,000	105,120,000
TOTAL	245,853,112,000	155,196,284,358	140,799,234,000	130,871,232,288	195,110,111,000	101,804,453,359

Keterangan:



: Tidak ada alokasi anggaran

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dengan memaksimalkan sumber anggaran yang ada untuk mendukung kinerja organisasi, namun pada triwulan III pencapaian kinerja sangat tergantung pada kondisi dilapangan mengingat terjadi pandemi covid-19. Pada tahun ini terdapat kebijakan pemerintah secara Nasional untuk penghematan untuk penanggulangan pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia, dimana Pagu semula Rp.270.143.837.000 menjadi Rp.195,110,111,000.

Optimalisasi yang telah dilakukan pada triwulan III 2020, telah optimalkan armada Kapal Pengawas Perikanan pusat yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal PSDKP (8 unit), untuk melaksanakan kegiatan pengawasan SDKP serta mengoptimalkan pelaksanaan operasi pemantauan udara sehingga pendeteksian terhadap kapal-kapal ikan yang melakukan penangkapan secara illegal dapat dilakukan secara cepat dan dikirimkan kepada kapal pengawas perikanan untuk selanjutnya dilakukan *intercept*, Pola *intercept* ini sangat menghemat Bahan Bakar Minyak, karena Kapal Pengawas Perikanan memiliki target yang jelas pada saat operasi.

BAB 4

PENUTUP

Laporan Kinerja
Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada
Direktorat Jenderal PSDKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Triwulan III 2020

A. Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada Triwulan III 2020 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada pada triwulan III 2020, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja, Terhadap capaian IK tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU pada periode yang sama tahun sebelumnya dan target Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020 sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan,
2. Total IKU dan IK Direktorat POA tahun 2020 sebanyak 29 IKU, Target pencapaian untuk periode triwulan III 2020 sebanyak 14 IKU, Dari target 14 IKU/IK tersebut sebanyak 12 IKU/IK telah tercapai sesuai rencana dan 2 IKU yang belum mencapai sesuai target yaitu:
 - a. **Tingkat pemahaman peserta bimtek lingkup Dit. POA** dari target **75%** tidak tercapai dikarenakan pandemi Covid-19, pelaksanaan kegiatan diagendakan pada triwulan III dan menunggu kondisi dan lingkungan sehat dan kondusif (bebas covid-19);
 - b. Nilai **kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Direktorat POA tidak tercapai**, dengan justifikasi disebabkan: Adanya revisi halaman III DIPA Satker Direktorat POA, kebijakan dalam pelayanan pada KPPN/pembatasan pengajuan SPM, sehingga performa penyelesaian tagihan terhambat, rendahnya penyerapan anggaran (pandemi covid-19), namun terdapat kebijakan Kementerian Keuangan dalam masa Pandemi- covid 19 Nilai IKPA tidak dapat dijadikan indikator pelaksanaan anggaran dan capaian nilai IKPA akan diukur pada akhir tahun.

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan beberapa kendala di atas, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

REKOMENDASI	TINDAKLANJUT
a) Memastikan pelaksanaan anggaran periode triwulan III 2020 berjalan sesuai dengan rencana penarikan dana dan rencana aksi pencapaian kinerja	a) Melakukan penyesuaian rencana penarikan dana sesuai dengan revisi anggaran, b) Melakukan rapat evaluasi bulanan terkait progress pelaksanaan anggaran